

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adji, Sution Usman.1989. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty, 1989.

Afandi, Ali.2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Cetakan Keempat. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Ansary, H.M.2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Belajar.

Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat.

ALKITAB.1981. *Lembaga Alkitab Indonesia*. Jakarta.

Djubaedah, Neng.2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

Ernawati, Titiek.1988. *Perkawinan Campuran Yang Dilakukan Antar Umat Berbeda Agama*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Gautama, Sudargo (Gouw Giok Siong).1980. *Hukum Antar Golongan*. Jakarta: Ichtiar BaruVanhoeve.

Gautama, Sudargo.1996. *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran* (Staatsblad 1898 No. 158). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hadisuprpto, Paulus.2008. *Kuliah Metode Penelitian Hukum*. UNDIP.

Hartono, Sunaryati.1976. *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Bina Cipta.

Hasan, Iqbal.2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

HS, Salim.2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Melida, Djaya S. 1988. *Masalah Perkawinan Antar Agamadan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Vrana Widya Darma.

Mulyadi.2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Prakoso Djoko.1987. *Azaz-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Prawirohamidjojo, R Soetojo.1988. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Rahardjo, Satjipto.2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Setiawan, I Ketut Oka. 2015.*Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Seto, Bayu.2006. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku Kesatu, Edisi Keempat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro, Ronny Hanitiji.1988. *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sostroatmodjo, Arso.1978. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang

Subadio, Maria Ulfa.1981. *Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawina*. Jakarta:

Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan XX. Jakarta: PT. Intermasa.

Sudarsono.1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Suhardana, F.X.2001. *Hukum Perdata I*. Jakarta: PT Prenhallindo.

Syahrani, Riduan.1992. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni.

Tutik, Titik Triwulan.2006.*Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*.Cetakan Pertama.Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Vollmar.1990. *Hukum Keluarga (Menurut KUH Perdata)*. Cetakan Kedua. Bandung: Tarsito.

Wantjik, Saleh.1976. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Widjaya, H. Ali Aksun.2010. *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Beserta Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Kependudukan*. Semarang: CV. Duta Nusindo.

B. JURNAL

Afida, Nur. 2012. “Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama”. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* (hlm 3).

Amir, Rahmah.2019. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-Qadau, Volume 6 Nomor 1* (hlm 107).

Halim, Abdul.2016. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dalam Tinjauan Yuridis”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan Volume 1 Nomor 1* (hlm 71).

HWP, Hutari.2006. “Legalitas Perkawinan Antar Pemeluk Beda Agama di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 36 Nomor 2* (hlm 229).

Kamila, Anita.2018. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan Di Luar Negeri”. TAHKIM. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Volume 1 Nomor1* (hlm 116-127).

Laplata.2017. “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama dalam Prespektif Yuridis”. *Jurnal Hukum* (hlm 35).

Lestari, Novita.2017. “Legalitas Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”. *Jurnal Hukum Sehasen Volume 2 Nomor 2* (hlm 171).

Munawar, Akhmad.2015. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”. *Jurnal Hukum Volume VII Nomor 13* (hlm 25).

Nugraha, Mifta Adi.1974. “Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan”. *Jurnal Hukum* (hlm 51).

Rohman, Moh. Taufiqur.2011. “Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama di Indonesia”, *Jurnal Hukum Volume 4, Nomor 1* (hlm 67).

Setiabudi.2016. “Analisis Perkawinan Beda Agama (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT DENGAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA)”. *Jurnal Hukum* (hlm 20).

Tahkim.2018. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Negeri”. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1* (hlm 116-127).

Ubaidan.2013. “Sistem Perkawinan Campuran dalam Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia”. *Jurnal Hukum UIN Surabaya* (hlm 31).

Wahyuni, Sri.2010. “Kontroversi Perkawinan Beda Agama”. *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 8 Nomor 1* (hlm 64).

Wahyuni, Sri.2017. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia”. *ejournal.uin*(hlm 132).

C. WAWANCARA

Wawancara dengan Advokat Armindo M. Amaral, Pengacara Lawfirm Yosep Parera, 11 Maret 2020

Wawancara dengan Hakim Anggota Ester Megaria Sitorus SH, MH. 10 Desember 2019

Wawancara dengan Sri Haryuniati, Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 26 November 2019.

D. WEBSITE

Anwar, Khairil.2011. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia”, <http://www.makalahnet.blogspot.com>, diakses pada 12 Desember 2011.

Lamandasa, Raimond Flora.2017. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, <http://www.scrtd.com/Raimond>, diakses pada tanggal 30 Januari 2017.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Staatsblad 1898

LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
SEMARANG**
Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 35 / Rst / 2019
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan
Riset-----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

N a m a : MONIKA SITANGGANG
N I M : 11010116130474
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS DIPONEGORO (UNDIP)
SEMARANG
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Prof. Sudarto, SH. Undip Tembalang
Semarang

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang tanggal, 10 Desember 2019 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

**“ KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN INTERRELIGIUS
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA “**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 10 Desember 2019

Hakim Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor
Semarang
Selaku Koordinator K.K.L.

M. D. ASTARA, SH., MH
0810720 198803 1 005